

---

## KONTRIBUSI MASYARAKAT PADA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dedi Prayitno

Akademi Fisioterapi "YAB" Yogyakarta

[dediprayitno888@gmail.com](mailto:dediprayitno888@gmail.com)

---

### ABSTRAK

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) adalah lembaga sosial masyarakat yang independen sebagai wadah partisipasi masyarakat dan mitra Kelurahan untuk mewujudkan aspirasi kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Penyelenggaraan Musrenbang harus dilakukan dengan ikut mendukung upaya pencegahan korupsi, sehingga diharapkan sasaran dalam fokus Keuangan Negara dapat tercapai dengan baik. Setelah memaparkan hasil dari penelitian dan membahasnya, dapat disimpulkan bahwa proses Musrenbang sudah berjalan dengan keterlibatan masyarakat yang cukup baik. Walaupun Musrenbang sudah cukup besar yakni sekitar 50% - 70 %, namun masih perlu upaya peningkatan peran peran serta RT, RW dan LPMK di daerah X pada proses Musrenbang. Pramusrenbang perlu melibatkan Kampus, Ormas/ Lembaga/ Perkumpulan dan pelaku usaha di wilayah sebagai bentuk kerjasama wilayah dan bentuk channeling menjadi pelengkap realisasi kegiatan fisik/ nonfisik yang tidak bisa diampu oleh pelaksana anggaran dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

**Kata Kunci:** *pemberdayaan masyarakat; musrenbang; pengawasan; perencanaan; anggaran daerah.*

### ABSTRACT

Village Community Empowerment (LPMK) is an independent community social institution as a forum for community participation and Village partners to realize the aspirations of community needs in the field of development. The implementation of Musrenbang must be carried out by supporting efforts to prevent corruption, so that it is hoped that the targets in the focus of State Finance can be achieved well. After presenting the results of the research and discussing them, it can be concluded that the Musrenbang process has been running with fairly good community involvement. Even though Musrenbang is already quite large, namely around 50% - 70%, efforts are still needed to increase the role of RT, RW and LPMK in area X in the Musrenbang process. Pramusrenbang needs to involve campuses, mass organizations/institutions/associations and business actors in the region as a form of regional cooperation and a form of channeling to complement the realization of physical/non-physical activities that cannot be handled by budget implementers from Regional Apparatus Organizations (OPD).

**Keywords:** *community empowerment; musrenbang; supervision; planning; regional budget.*

## PENDAHULUAN

Sejak dekade terakhir adanya peningkatan kebutuhan maupun pendekatan baru dalam pembangunan yang disebut pendekatan partisipatif atau partisipasi. Pendekatan partisipatif atau partisipasi muncul akibat sistem yang cenderung statistik dan Top-Down (Iverson & Dervan, n.d.-a). Ketergantungan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah pusat yang cenderung tidak menyentuh kebutuhan pembangunan itu sendiri mendorong percepatan dan reformasi dalam aspek kehidupan terutama peran yang dimainkan secara proporsional oleh berbagai elemen masyarakat (Ah-Thiane et al., 2023) . Peran pemerintah dalam pembangunan tidak terlepas dari peran dari masyarakat, maka keberadaan masyarakat juga tidak dapat dipandang sebelah mata dalam kehidupan bernegara dan dalam kegiatan pembangunan. Pengawasan pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang memiliki objek yang sama mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan agar senantiasa sesuai dengan rencana (Ley 25.632, 2002).

Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2018 diwujudkan dalam bentuk hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) menjadi acuan Kementrian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lain (perseorangan, kelompok masyarakat, badan hukum, organisasi praktisi, akademisi, asosiasi, mitra pembangunan, dan media massa) dalam aksi pencegahan korupsi di Indonesia. Salah satu fokus Stranas PK adalah Keuangan Negara.

Berkaitan dengan penyelenggaraan Keuangan Negara di lingkup Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemerintah Daerah X adalah pelaksanaan pertemuan antar pihak- pihak yang mendapat manfaat atau dampak dari program dan kegiatan pembangunan daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah dalam rangka membahas rancangan dokumen rencana pembangunan daerah menjadi

rancangan akhir dokumen rencana pembangunan daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017, disebutkan pula Musrenbang dimulai dari tingkat pemerintahan desa / kelurahan Musrenbang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif (BPK, 2008), Watch Relation of Corruption dan Pengawas Aset Negara Republik Indonesia Daerah Kota X memandang penting dan perlu turut serta dalam kajian kegiatan Musrenbang lebih baik yang mana sangat sesuai dengan fungsi dan ketugasannya dalam upaya tindak pencegahan korupsi dan pengawasan aset negara dan membantu memastikan sistem pemerintahan berjalan sesuai aturan perundangan yang ada. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) adalah lembaga sosial masyarakat yang independen sebagai wadah partisipasi masyarakat oleh, dari dan untuk serta dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang Pembangunan (Aghion & Jaravel, 1989). Berdasarkan Peraturan Walikota juga disebutkan bahwa salah satu hak dari pengurus LPMK yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di wilayah kerjanya.

Prinsip partisipatif dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah seperti yang telah disebutkan di atas, memiliki potensi untuk dikaitkan dengan upaya pencegahan tindak pidana korupsi (Harianto; Rahardjo, 2022). Penyelenggaraan Musrenbang ikut mendukung upaya pencegahan korupsi, sehingga diharapkan sasaran dalam fokus Keuangan Negara seperti yang telah disebutkan di atas dapat tercapai dengan baik (Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, 2014).

## **LANDASAN TEORI**

### **1) Partisipasi Masyarakat**

Pengertian Partisipasi sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata “participation” yang dapat diartikan suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan diikuti sertakan atau mengambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, partisipasi merupakan keterlibatan aktif masyarakat atau partisipasi tersebut

dapat berarti keterlibatan proses penentuan arah dari strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Sedangkan dalam kamus lengkap bahasa Indonesia “partisipasi” berarti hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan keikutsertaan.

Menurut Histiraludin (Tahulending et al., 2018) mengemukakan partisipasi lebih pada alat sehingga dimaknai partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat secara aktif, dalam ketelibatan seluruh proses kegiatan sebagai media penumbuh kohesifitas antar masyarakat, masyarakat dengan pemerintah juga menggalang rasa memiliki dan tanggung jawab pada program yang di lakukan. Istilah partisipasi menjadi kata kunci dalam setiap program pengembangan masyarakat, seolah-olah menjadi model baru yang harus melekat pada setiap rumusan kebijakan dan proposal proyek. Pada pengembangannya sering kali di ucapkan tetapi kurang di praktekan sehingga cenderung kehilangan makna. Partisipasi sepadan dengan arti peran serta, ikut serta, keterlibatan atau proses bersama saling memahami, merencanakan, menganalisis dan melakukan tindakan oleh sejumlah anggota masyarakat.

Menurut (Dwiningrum, 2002) partisipasi diartikan sebagai upaya peran serta masyarakat dalam suatu kegiatan baik dalam bentuk pernyataan maupun kegiatan. Lebih lanjut dijelaskan partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam program- program pembangunan. Menurut Made Pirdata (Dwiningrum, 2002) partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimiliki dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan. Menurut Theodorson (Haetami & Triansyah, 2001) menyatakan bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang didalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya, diluar pekerjaan dan profesinya sendiri. Keikutsertaan tersebut dilakukan sebagai akibat dari terjadinya interaksi sosial antara individu yang bersangkutan dengan anggota masyarakat yang lain.

Raharjo (Nisa & Anwar, 2020) mengemukakan adanya tiga variasi partisipasi,

yaitu:

- a. Partisipasi Terbatas, yaitu partisipasi yang hanya digerakkan untuk kegiatan-kegiatan tertentu demi tercapainya tujuan pembangunan, tetapi untuk kegiatan tertentu yang dianggap menimbulkan kerawanan bagi stabilitas.
- b. Partisipasi Penuh, artinya partisipasi seluas-luasnya dalam segala aspek kegiatan pembangunan.
- c. Mobilisasi Tanpa Partisipasi, artinya partisipasi yang dibangkitkan pemerintah atau penguasa, tetapi masyarakat sama sekali tidak diberi kesempatan untuk turut mengajukan tuntutan maupun mempengaruhi jalannya kebijakan pemerintah

Menurut (Jufri, 2020) mengatakan bahwa partisipasi adalah keterlibatan mental atau emosional orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi pada tujuan kelompok dan berbagai tanggung jawab untuk mencapainya. Sedangkan dalam (Aminah & Prasetyo, 2018) berpendapat bahwa partisipasi adalah kesediaan masyarakat secara sukarela untuk membantu kelangsungan program-program pemerintah yang tercermin dari pikiran, sikap dan tindakan mereka berdasarkan model kerangka partisipasi yang di kembang baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun tahap pengambilan manfaat dari program yang terdapat di lingkungan tempat tinggal mereka. Partisipasi masyarakat adalah peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam mengidentifikasi masalah, pengambilan keputusan dan memberikan alternatif solusi melalui pikiran, keahlian, waktu, modal dan atau materi terhadap program yang di laksanakan oleh pemerintah. Sebagai sebuah tujuan, partisipasi merupakan pemberdayaanyaitu setiap orang berhak menyatakan pendapat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupannya. Partisipasi masyarakat adalah hak dan kewajiban seseorang warga Negara untuk memberikan kontribusinya kepada pencapaian tujuan kelompok. Partisipasi dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan semua kemampuan yang di milikinya dalam segala kegiatan yang di laksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan.

Partisipasi yang di dorong oleh mental dan emosi di sebut partisipasi otonom, sedangkan partisipasi yang di dorong oleh paksaan di sebut mobilisasi. Partisipasi mendorong seseorang atau kelompok untuk menyumbang atau mendukung kegiatan bersama berdasarkan kesukarelaan sehingga tumbuh rasa tanggung jawab bersama terhadap kepentingan kelompok atau organisasi.

Partisipasi masyarakat menurut (Andreeyan, 2014) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Partisipasi masyarakat menekankan pada partisipasi langsung warga dengan pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Sedangkan menurut (Sombang, 2021) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat telah menggali konsep partisipasi menuju pada suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan di berbagai golongan kecil yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Menurut (Dewi Wulaningrum, 2018) partisipasi masyarakat merupakan suatu hak yang di miliki masyarakat untuk ikut andil dalam pengambilan keputusan. Keputusan di dalam tahapan proses pembangunan mulai dari awal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pelestarian lingkungan. Di sini masyarakat tidak hanya penerima fasilitas maupun manfaat tetapi sebagai subjek pembangunan yang berkesinambungan. Dengan demikian partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan dan pelaksanaan (implementasi) program atau proyek pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat lokal. Partisipasi masyarakat memiliki ciri-ciri yang bersifat proaktif dan reaktif (artinya masyarakat ikut menalar baru bertindak), ada kesempatan yang dilakukan oleh semua yang terlibat, ada tindakan yang mengisi kesepakatan tersebut. Ada pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam kedudukan yang setara.

## 2) Perencanaan Pembangunan

Pengertian perencanaan pembangunan dapat dilihat berdasarkan unsur-

unsur yang membentuknya yaitu: perencanaan dan pembangunan. Menurut (Muharam et al., 2022) bahwa teori perencanaan yang ideal ialah yang tidak hanya mampu mengakomodasikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat tetapi juga mampu mamadukan berbagai kepentingan yang terlibat. Perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternative atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada fakta yang akan di gunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan / aktifitas kemasyarakatan baik yang bersifat fisik maupun nonfisik dalam rangkaian mencapai tujuan yang lebih baik. (Muharam et al., 2022). Lebih lanjut (Kartono & Nurcholis, 2016) mengemukakan bahwa perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal proses pembangunan. Sebagai tahapan awal maka perencanaan pembangunan merupakan pedoman atau acuan atau dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Karena itu perencanaan pembangunan hendaknya bersifat implementatif (dapat melaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan), serta perlu di susun dalam suatu perencanaan strategis dalam arti tidak terlalu mengatur, penting, mendesak, dan mampu menyentuh kehidupan masyarakat luas., sekaligus mampu mengantisipasi tuntutan perubahan baik internal maupun eksternal, serta di susun berdasarkan fakta riil di lapangan. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan adalah sebagai alat merencanakan untuk masa yang akan datang, untuk melakukan perubahan yang lebih baik dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan tersebut.

### 3) Pengawasan

Viera Valencia & Garcia Giraldo (2019) mengemukakan ada sembilan jenis-jenis pengawasan yaitu:

- a. Pengawasan Fungsional, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa setiap kelembagaan atau organisasi apapun bentuknya besar maupun kecil senantiasa membutuhkan pengawasan, tetapi kelembagaan yang bentuknya kecil pengawasan yang dilakukan tidak perlu secara fungsional, tetapi kelembagaan yang bentuknya besar, seperti kelembagaan negara dengan aktifitas yang begitu rumit dan kompleks, maka sangat dibutuhkan jenis

- pengawasan yang sifatnya fungsional dengan menggunakan tenaga kerja manusia yang memiliki pengetahuan khusus dan pekerjaan khusus dibidang pengawasan.
- b. Pengawasan Masyarakat, Sebagaimana kita ketahui negara mempunyai masyarakat sebagai warga negara, dan pemerintah sebagai penyelenggara negara, agar penyelenggaraan negara berdasarkan konstitusional dan mencegah terjadinya penyalahgunaan sumber daya negara, maka sangat dibutuhkan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai warga negara. Penyelenggaraan pengawasan masyarakat ditujukan kepada pemerintah sebagai penyelenggara negara agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan terutama penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah atas nama negara. Secara realitas bahwa yang paling banyak melakukan penyalahgunaan sumber daya negara adalah penguasa, terutama penyelenggara pemerintahan, misalnya manipulasi pajak, keuangan dan sebagainya.
  - c. Pengawasan Administratif, Penataan pelaksanaan seluruh aktivitas dalam bagi seluruh kelembagaan agar dapat tercipta keteraturan, maka diperlukan suatu bentuk pengawasan yang kita istilahkan pengawasan administratif.
  - d. Pengawasan Teknis, Selain pekerjaan dalam sebuah kelembagaan atau organisasi yang berkaitan dengan kegiatan administratif, sesungguhnya yang tidak kalah pentingnya adalah kegiatan teknis karena pekerjaan ini akan dapat memberikan hasil sesuai dengan kebutuhan manusia.
  - e. Pengawasan Pimpinan, Sebagaimana kita maklumi bahwa setiap kelembagaan senantiasa terdapat dua unsur posisi manusia di dalamnya: pertama, unsur sebagai pemimpin; dan kedua, sebagai unsur yang di pimpin. Sebagai unsur yang dipimpin berfungsi untuk melaksanakan kegiatan atau pekerjaan yang diberikan oleh unsur pemimpin, sedangkan sebagai unsur pemimpin memiliki tugas untuk melakukan pengawasan kepada yang dipimpinnya agar pekerjaan yang dilaksanakan tersebut dapat berjalan dengan baik dan mencegah terjadinya kemungkinan pemborosan yang dapat berakibat merugikan anggota kelembagaan itu sendiri. Tanpa adanya pengawasan pimpinan yang dilakukan secara sungguh-sungguh dapat

dikatakan para pelaksana kegiatan akan tidak disiplin kerja.

- f. Pengawasan Barang, Semuanya orang akan mengatakan bahwa apabila suatu barang dikelola atau diurus oleh seseorang atau sekelompok orang tidak akan terjamin keamanannya apabila tidak ada yang mengawasinya. Pengawasan barang berarti suatu usaha yang dilakukan secara sadar untuk menjamin terhadap keamanan suatu barang  
maupun akan memberikan manfaat kepada pelaksanaan tugas kelembagaan yang memiliki hak tentang barang tersebut.
- g. Pengawasan Jasa, adalah suatu imbalan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang menjadi anggota kelembagaan, jasa dari pihak ketiga atau sebaliknya ini, tidak akan berjalan sebagaimana mestinya jikalau tidak ada pengawasan yang dilakukan secara baik dan tegas.
- h. Pengawasan Internal, Apabila kita melihat bahwa kelembagaan itu memiliki jangkauan yang luas dan terbentuk sub-sub kelembagaan didalamnya, misalnya kelembagaan negara yang memiliki sub kelembagaan antara lain kelembagaan eksekutif, legislatif, yudikatif, auditif dan semacamnya. Pengawasan yang dibentuk dalam kelembagaan itu sendiri untuk mengamankan dalam rangka memperlancar penyelenggaraan tugas, unit kelembagaan inilah yang dimaksudkan disini pengawasan internal.
- i. Pengawasan Eksternal, adalah pengawasan yang dilakukan secara legalitas oleh lembaga pengawasan di luar sub kelembagaan tertentu, misalnya BPK. Pengawasan yang dilakukan oleh BPK kepada lembaga negara lainnya disebut dengan pengawasan eksternal. Setiap unit kelembagaan senantiasa mengharapkan pengawasan eksternal secara efektif dan efisien dari pada seluruh penggunaan sumberdaya yang dimiliki oleh lembaga yang bersangkutan.

#### 4) Pembangunan

Secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi secara alami

sebagai dampak dari adanya pembangunan (Akbar, 2019).

Menurut (Undap, 2017) Pembangunan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang, beberapa orang, organisasi, maupun yang dilakukan oleh bangsa atau negara dengan mengarah kepada perbaikan kualitas kehidupan dengan mencegah terjadinya suatu bentuk kemiskinan atau kemarjinalan.

Sedangkan menurut (Hariyoga, 2013) mengemukakan pembangunan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik secara individual maupun kelompok, dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan baik terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan alam.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **1. Hipotesa Penelitian**

Pada penelitian ini ada 2 hipotesa (Ekasari, 2018) yaitu:

1. Terdapat perbedaan antara harapan masyarakat dengan kinerja pembangunan daerah.
2. Terdapat perbedaan tingkat kepuasan masyarakat berdasarkan karakteristik responden.

### **2. Identifikasi Variabel**

Variabel dalam penelitian ini adalah harapan dan kinerja dari indikator- indikator yang diteliti (Sayedi et al., 2023). Dengan mengetahui hal tersebut, yang digunakan untuk mengetahui keterlibatan masyarakat terhadap perencanaan dan pengawasan pembangunan (Rahman & Rosmita, 2019).

Adapun tanggapan pelanggan :

- a. Tingkat harapan (sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, tidak baik).
- b. Tingkat kinerja (sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, tidak baik)

### **3. Variabel Penelitian.**

Untuk variabel penelitian adalah mengukur harapan masyarakat dan selanjutnya mengukur kinerja pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat dengan menyusun daftar pertanyaan terkait (Rotty, 2016).

#### 4. Populasi dan Sampel

Karena populasi tidak diketahui secara pasti maka untuk mengetahui/memperkirakan dengan rumus berikut (Dewi et al., 2015):

$$n = \frac{Z^2_{1/2\delta} (P(1-P))}{e^2}$$

Dimana

n = jumlah sampel

$Z_{1/2\delta}$  = nilai pada tabel kurva normal pada taraf keyakinan

tertentu e = kesalahan duga yang dapat ditolelir

P = parameter proporsi sukses

Dengan  $\delta = 5\%$  ,  $e = 10\%$  ,maka

$$f(P) = P - P^2$$

$$\frac{df(P)}{dP} = 1 - 2P$$

$$\frac{df(P)}{dP} = 0$$

$$1 - 2P = 0$$

$$P = \frac{1}{2}$$

Harga maksimal dari  $f(P)$

$$\text{adalah } P - P^2 = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} =$$

$$\frac{1}{4}$$

$$n = \frac{1,96^2 \cdot \frac{1}{4}}{0,01^2} = 96,4 = 100$$

Dalam penelitian ini menjadi populasi adalah masyarakat di daerah X yang tersebar di berbagai wilayah. Teknik pengambilan sampel non probabilitas dengan metode *quota sampling* dan *convenience sampling* (Firmansyah & Dede, 2022).

## Metode Pengumpulan Data

### a. Jenis Data

Data primer yaitu data yang didapat langsung dari responden melalui pengisian kuesioner (Pratiwi, 2017).

### b. Metode Pengumpulan Data

- 1) Kuesioner dengan mengajukan pertanyaan tidak langsung kepada responden dengan menggunakan kuesioner (Isti Pujihastuti, 2010). Kuesioner ini disebarkan peneliti berdasarkan kuesioner yang dibuat peneliti dengan acuan dari teori-teori yang berhubungan dengan kepuasan masyarakat terhadap pembangunan di daerah X
- 2) Wawancara dengan masyarakat (Iverson & Dervan, n.d.-b).

### c. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data yang digunakan untuk mengukur variabel adalah kuesioner (Agustina, 2017). Kuesioner yang akan dibagikan berisikan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan lima dimensi kualitas pelayanan. Kuesioner tersebut berisi item-item pertanyaan sebagai penjabaran dari indikator-indikator variabel yang masing-masing berisikan unsur pelayanan (Maharani et al., 2023). Dalam penyusunan kuesioner, penulis menggunakan jenis pertanyaan dengan jawaban alternatif tertentu (Yahdi Kusnadi, 2016). Responden hanya memilih satu jawaban yang disediakan dengan memberikan tanda pada jawaban yang dipilih dari setiap pertanyaan (Susilowati, 2020). Untuk mengubah data dari variabel-variabel yang ada ke dalam perhitungan data, maka penulis menggunakan model Skala Likert dengan skala ordinal. Menurut (Effendy & Kunto, 2013) skala likert berhubungan dengan pertanyaan terhadap sesuatu misalnya setuju-tidak setuju dan baik-tidak baik. Pada skala likert ini, responden menjawab pertanyaan penelitian dengan memberikan tanda silang (X) pd alternatif jawaban dengan 5 kemungkinan yang tersedia. Untuk mengukur kepuasan pasien melalui tanggapan mereka dipergunakan kuesioner yang disebarkan kepada responden yang terpilih. Kuesioner tersebut mengenai lima dimensi kualitas pelayanan untuk mengungkapkan sejauh mana tingkat kepuasan pasien dengan membandingkan antara tingkat kepentingan /harapan pengguna jasa dengan tingkat tentang pembangunan di di daerah X berdasarkan tanggapan pasien. Dalam hal ini penulis akan memberikan pertanyaan untuk mengukur tingkat kepentingan dan tingkat kinerja pelayanan dengan masing-masing 5 alternatif jawaban yaitu 1, 2, 3, 4, 5 yang harus dipilih salah satu jawaban saja bagi pelanggan yang paling sesuai berdasarkan kepentingan dan kinerja layanan yang dirasakan pelanggan dengan memberikan tanda silang (X). Maka bentuk perhitungan bobot setiap jawaban dengan menggunakan skala likert sebagai berikut :

Untuk Kepentingan/ Harapan :

Nilai 5 = Sangat Baik; Nilai 4 = Baik; Nilai 3 = Cukup Baik; Nilai 2 = Kurang Baik; Nilai 1 = Tidak Baik

Untuk Kinerja :

Nilai 5 = Sangat Baik; Nilai 4 = Baik; Nilai 3 = Cukup Baik; Nilai 2 = Kurang Baik; Nilai 1 = Tidak Baik

Sebelum kuesioner digunakan sebagai alat pengukur, perlu diadakan pengujian terlebih dahulu apakah kuesioner ini telah memenuhi kriteria valid (tepat) dan reliabel (stabil) dengan diuji validitas menggunakan program SPSS dan reliabilitas.

Reliabilitas yang digunakan adalah reliabilitas internal, yaitu reliabilitas yang diperoleh dengan cara menganalisis data dari satu kali hasil pengujian. Hal demikian ditempuh peneliti dengan alasan sebagai berikut :

- Tidak semua konsumen yang mempunyai atau mengetahui tentang pembangunan di daerah X bersedia menjadi responden
- Karena alasan tidak cukup waktu dari responden tidak memungkinkan diberikan daftar pertanyaan ulang
- Bila daftar pertanyaan sampai dibawa pulang, kemungkinan kecil  
un  
tuk kembali

Sebagaimana halnya dengan pengujian validitas, proses pengujian reliabilitas juga menggunakan program yang sama, yaitu dengan menggunakan SPSS. Sehingga hasil pengujian yang diperoleh akan benar-benar valid dan reliabel.

## 5. Metode Analisis Data

1. Untuk mengetahui kepuasan atau ketidakpuasan konsumen pada masing-masing atribut pelayanan digunakan **Analisis Selisih** (Prinitasari & Sidqi, 2021). Yaitu dengan mencari selisih antara kinerja pembangunan dengan harapan masyarakat. Bila selisih antara kinerja dengan harapan sama dengan nol dan atau lebih besar dari nol (positif) berarti masyarakat puas sedangkan bila kinerja lebih kecil dari harapan (negatif) berarti konsumen tidak puas. Pengukuran kepuasan atau ketidakpuasan masyarakat ini

dilakukan untuk masing-masing atribut maupun secara keseluruhan bagi setiap konsumen yang menjadi sampel. Analisis selisih ini selanjutnya menjadi data untuk pengujian perbedaan kepuasan/ ketidakpuasan konsumen berdasarkan karakteristik responden (Saputra et al., 2020).

2. Untuk menganalisis tingkat kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat kota Yogyakarta digunakan **Uji Peringkat Bertanda Wilcoxon** dengan software SPSS (Windi et al., 2022). Langkah-langkah pengujian sebagai berikut:

a.  $H_0$  = Tidak ada perbedaan antara harapan dan kinerja  $H_1$  = Ada perbedaan antara harapan dan kinerja

b. Menentukan taraf signifikansi ( $\alpha$ ) 0,05 dengan  $dk = k - 1$

c. Kriteria pengujian:

$H_0$  diterima apabila: Probabilitas  $> \alpha$

$H_0$  ditolak apabila: Probabilitas  $< \alpha$

d. Kesimpulan:

$H_0$  diterima berarti tidak ada perbedaan hasil penilaian harapan dengan kinerja pelayanan, maka dapat disimpulkan bahwa konsumen memperoleh kepuasan dalam penggunaan pelayanan kesehatan tersebut. Dan sebaliknya jika  $H_0$  ditolak berarti ada perbedaan hasil penilaian harapan dan kinerja dan berarti pula konsumen merasa tidak puas terhadap pelayanan kesehatan yang diterimanya.

3. Untuk menjelaskan ada atau tidaknya perbedaan kepuasan atau ketidakpuasan kelompok menurut karakteristik konsumen yang diuji, maka digunakan teknik **Analisis Ragam Satu Arah Kruskal-Wallis** dengan menggunakan software SPSS. Adapun langkah-langkah pengujian adalah sebagai berikut (Quraisy et al., 2021):

a.  $H_0$  = Tidak ada perbedaan tingkat kepuasan konsumen berdasarkan karakteristik responden.

$H_1$  = Terdapat perbedaan tingkat kepuasan konsumen berdasarkan karakteristik responden.

b. Menentukan taraf signifikansi ( $\alpha$ ) 0,05 dengan  $dk = k - 1$

## c. Kriteria pengujian:

$H_0$  diterima apabila: Probabilitas  $> \delta$

$H_0$  ditolak apabila: Probabilitas  $< \delta$

## d. Kesimpulan:

$H_0$  diterima berarti tidak ada perbedaan tingkat kepuasan konsumen berdasarkan karakteristik responden. Dan sebaliknya, jika  $H_0$  ditolak berarti ada perbedaan perbedaan tingkat kepuasan atau ketidakpuasan konsumen berdasarkan karakteristik responden

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif ini bertujuan untuk mengetahui tanggapan dan karakteristik informan terhadap item-item pertanyaan dalam kuesioner. Informan dalam penelitian ini adalah para pengurus LPMK di daerah X dan unsur unsur masyarakat yang terlibat dalam usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode *convenience sampling* dengan pengambilan data dilakukan dengan metode *survey* dengan menggunakankuesioner secara tertulis yang diberikan langsung dan google-fom kepada informan. Jumlah sampel yang terkumpul berjumlah 70 Informan yang tersebar di 14 kemantren dan 45 kelurahan.

#### 4.1.1 Gambaran Umum Informan

Gambaran umum informan diperoleh dari data bagian informasi demografi yang terdapat pada kuesioner penelitian. Pada bagian informasi demografi terdapat bagian identitas responden yang terdiri dari jenis kelamin, status pekerjaan, status dalam masyarakat, golongan masyarakat, tingkat pendidikan, range usia dan klasifikasi unsur dalam tahapan Musrenbang. Adapun gambaran umum informan, dapat dilihat pada tabel-tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Jenis Kelamin Informan**

Jenis Kelamin	Frekuensi	Prosentase
Pria	42	60
Wanita	28	40
Jumlah	70	100

Dapat diketahui, berdasarkan tabel 4.1 bahwa informan dengan jenis kelamin pria sebanyak 42 orang dengan persentase sebanyak 60%, sedangkan dengan jenis kelamin wanita sebanyak 28 orang dengan tingkat persentase sebanyak 40%. Sehingga informan terbanyak dengan jenis kelamin pria sebanyak 42 orang.

**Tabel 4.2 Informan Berdasarkan Status Pekerjaan**

Status Pekerjaan	Frekuensi	Prosentase
Wakil Rakyat	0	0.00
PNS/TNI/POLRI/Pensiunan	8	11.43
Swasta/Wiraswasta	19	27.14
Karyawan Swasta	14	20.00
Petani/Peternak/Pedagang	2	2.86
Ibu Rumah Tangga	14	20.00
Pelajar/Mahasiswa	3	4.29
Lainnya	10	14.29
Jumlah	70	100.00

Dapat diketahui, berdasarkan tabel 4.2 bahwa dari 70 informan dengan status pekerjaan PNS/TNI/POLRI/Pensiunan dengan tingkat prosentase 11,43% sebanyak 8 orang, status pekerjaan swasta/wiraswasta dengan tingkat prosentase 27,14% sebanyak 19 orang, status pekerjaan karyawan swasta dengan tingkat prosentase 20% sebanyak 14 orang, status pekerjaan petani/peternak/pedagang dengan tingkat prosentase 2,86% sebanyak 2 orang, status pekerjaan ibu rumah tangga dengan tingkat prosentase 20% sebanyak 14 orang, status pekerjaan pelajar dengan tingkat prosentase 4,29% sebanyak 3 orang, status pekerjaan lainnya dengan tingkat prosentase 14,29% sebanyak 10 orang. Maka dari itu, jumlah informan terbanyak adalah 19 orang dengan status pekerjaan swasta/wiraswasta.

**Tabel 4.3 Informan Berdasarkan Status Dalam Masyarakat**

Status dalam masyarakat	Frekuensi	Prosentase
Tokoh Masyarakat	24	34.29
Masyarakat Umum	24	34.29
Asosiasi	1	1.43
Organisasi Masyarakat	16	22.86
Pemangku Wilayah	5	7.14
Jumlah	70	100.00

Dapat diketahui, berdasarkan tabel 4.3 bahwa dari 70 informan dengan status dalam masyarakat sebagai tokoh masyarakat dengan tingkat prosentase 34,29% sebanyak 24 orang, status dalam masyarakat sebagai masyarakat umum dengan tingkat prosentase 34,29% sejumlah 24 orang, status dalam masyarakat sebagai anggota asosiasi dengan tingkat prosentase 1,43% sebanyak 1 orang, status dalam masyarakat sebagai organisasi masyarakat dengan tingkat prosentase 22,86% sebanyak 16 orang dan status dalam masyarakat sebagai pemangku wilayah dengan tingkat prosentase 7,14%

sebanyak 5 orang. Maka dari itu, jumlah informan terbanyak adalah 24 orang dengan status dalam masyarakat sebagai tokoh masyarakat dan masyarakat umum.

**Tabel 4.4 Informan Berdasarkan Penyandang Disabilitas**

Penyandang Disabilitas	Frekuensi	Prosentase
Ya	0	0
Tidak	70	100
Jumlah	70	100

Dapat diketahui, berdasarkan tabel 4.4 bahwa informan penyandang disabilitas tidak ada dan semua informan dalam kondisi normal 100% yakni 70 orang.

**Tabel 4.5 Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Prosentase
SD, SLTP	3	4.29
SMU/SMK	22	31.43
Diploma, Sarjana, Pascasarjana	45	64.29
Jumlah	70	100.00

Dapat diketahui, berdasarkan tabel 4.5 bahwa dari 70 informan dengan persentase 4,29% sebanyak 3 orang berpendidikan SD, SMP. Sebanyak 22 informan dengan persentase 31,43 % berpendidikan SMU/SMK. Kemudian sebanyak 45 informan dengan persentase 64,29 % berpendidikan Diploma, Sarjana, Pascasarjana. Maka dari itu, jumlah informan terbanyak yaitu 45 orang jenjang pendidikan Diploma, Sarjana, Pascasarjana.

**Tabel 4.6 Informan Berdasarkan Tingkat Usia**

Usia	Frekuensi	Prosentase
1 -20 tahun	1	1.43
21 - 40 tahun	8	11.43
41 - 60 tahun	46	65.71
61 tahun ke atas	15	21.43
Jumlah	70	100.00

Berdasarkan tabel 4.6 bahwa dari 70 informan dengan rentang usai 1-20 tahun dengan prosentase 1,43% sebanyak 1 orang, rentang usia 21-40 tahun dengan prosentase 11,43% sebanyak 8 orang, rentang usia 41-60 tahun dengan prosentase 65,71% sebanyak 46 dan usia lebih dari 61 tahun dengan prosentase 21,43% sebanyak 15 orang. Maka dari itu, jumlah informan terbanyak yaitu 46 orang rentang usia 41-60 tahun.

**Tabel 4.7 Informan Berdasarkan Unsur Masyarakat dalam tahapan Musrenbang**

Unsur dalam Masyarakat	Frekuensi	Prosentase
LPMK	20	28.57
BKM	2	2.86
PKK	9	12.86
RT	9	12.86
RW	3	4.29
Lainnya	27	38.57
Jumlah	70	100.00

Dapat diketahui, berdasarkan tabel 4.7 bahwa dari 70 informan dengan perwakilan dari LPMK dengan prosentase 28,57% sebanyak 20 orang, perwakilan dari BKM dengan prosentase 2,86% sebanyak 2 orang, perwakilan PKK dengan prosentase 12,86% sebanyak 9 orang, perwakilan dari RT dengan prosentase 12,86% sebanyak 9 orang, perwakilan RW dengan prosentase 4,29% sebanyak 3 orang dan perwakilan lainnya

dengan prosentase 38,57 sebanyak 70 orang. Maka dari itu jumlah terbanyak dari informan adalah lainnya yang mencapai 27 orang.

#### 4.1.2 Tanggapan Informan

Kuesioner yang diberikan terdapat tanggapan informan mengenai kondisi di wilayahnya masing masing.

**Tabel 4.8 Perwakilan setiap RW yang menjadi anggota LPMK**

Perwakilan RW yang menjadi LPMK	Frekuensi	Prosentase
Ya	53	75.71
Tidak ada	17	24.29
Jumlah	70	100.00

**Tabel 4.9 Perwakilan RW yang menjadi anggota LPMK**

Jumlah Perwakilan	Frekuensi	Prosentase
1 orang	28	49.12
2-3 orang	26	45.61
Lebih dari 3 orang	3	5.26
Jumlah	57	100.00

**Tabel 4.10 Tingkat keaktifan anggota LPMK**

Tingkat Keaktifan	Frekuensi	Prosentase
Kurang dari 30%	14	20.00
Antara 31-50%	23	32.86
Antara 51-70%	25	35.71
Lebih dari 71%	8	11.43
Jumlah	70	100.00

**Tabel 4.11 Pertemuan Rutin/Berkala untuk Pengurus LPMK**

Pertemuan Rutin Berkala	Frekuensi	Prosentase
Ada	33	47.14
Tidak	12	17.14
Hanya bila diperlukan	25	35.71
Jumlah	70	100.00

**Tabel 4.12 Pengurus LPMK Berjenis Kelamin Perempuan**

Pengurus Berjenis Kelamin Perempuan	Frekuensi	Prosentase
-------------------------------------	-----------	------------

Ada	58	82.86
Tidak	12	17.14
Jumlah	70	100.00

**Tabel 4.13 Pengurus LPMK dari Golongan Difabel**

Pengurus Dari Golongan Difabel	Frekuensi	Prosentase
Ada	58	82.86
Tidak	12	17.14
Jumlah	70	100.00

**Tabel 4.14 Komunikasi antar pengurus LPMK**

Komunikasi antar pengurus	Frekuensi	Prosentase
Ya, baik	50	71.43
Masih kurang baik	18	25.71
Tidak baik	2	2.86
Jumlah	70	100.00

**Tabel 4.15 Koordinasi yang baik dan kompak antar anggota LPMK**

Koordinasi antar pengurus	Frekuensi	Prosentase
Ya, baik	52	74.29
Masih kurang baik	17	24.29
Tidak baik	1	1.43
Jumlah	70	100.00

**Tabel 4.16 Kolaborasi LPMK dengan Kelurahan**

Kolaborasi dengan Kelurahan	Frekuensi	Prosentase
Ya, baik	57	81.43
Masih kurang baik	12	17.14
Tidak baik	1	1.43
Jumlah	70	100.00

**Tabel 4.17 Proses Musrenbang Mudah dan Efisien**

Proses Musrenbang mudah dan efisien	Frekuensi	Prosentase
Ya, baik	49	70.00
Masih kurang baik	18	25.71
Tidak baik	3	4.29

Jumlah	70	100.00
--------	----	--------

**Tabel 4.18 Mekanisme Musrenbang efektif mengakomidir aspirasi masyarakat.**

Mekanisme Musrenbang efektif	Frekuensi	Prosentase
Sudah	45	64.29
Masih Belum	25	35.71
Jumlah	70	100.00

**Tabel 4.19 Keterlibatan Masyarakat dalam proses Musrenbang**

Keterlibatan Unsur Masyarakat	Frekuensi	Prosentase
Kurang dari 30%	6	8.57
Antara 30-50%	20	28.57
Antara 50-75%	38	54.29
Lebih dari 76%	6	8.57
Jumlah	70	100.00

**Tabel 4.20 Pemahaman Masyarakat dalam menyampaikan usulan dalam proses Musrenbang**

Pemahaman Unsur Masyarakat	Frekuensi	Prosentase
Kurang dari 30%	11	15.71
Antara 30-50%	21	30.00
Antara 50-75%	33	47.14
Lebih dari 76%	5	7.14
Jumlah	70	100.00

**Tabel 4.21 Sosialisasi langsung dari Pemerintah tentang pedoman pelaksanaan Musrenbang kepada masyarakat umum**

Sosialisasi langsung dari Pemerintah	Frekuensi	Prosentase
Dilakukan	44	62.86
Tidak	26	37.14
Jumlah	70	100.00

**Tabel 4.22 Membaca Buku Pedoman Musrenbang**

Membaca Buku Pedoman Musrenbang	Frekuensi	Prosentase
Ya	45	64.29
Tidak	25	35.71
Jumlah	70	100.00

**Tabel 4.23 Pemahaman Isi Buku Pedoman Musrenbang**

Faham isi buku pedoman Musrenbang	Frekuensi	Prosentase
Ya	45	64.29
Tidak	25	35.71
Jumlah	70	100.00

## KESIMPULAN

Setelah memaparkan hasil dari penelitian dan membahasnya, dapat disimpulkan bahwa proses Musrenbang dengan keterlibatan masyarakat yang cukup baik. Namun untuk memaksimalkan proses Musrenbang agar lebih baik lagi perlu adanya Peran serta RT, RW dan LPMK di daerah X pada proses Musrenbang sudah cukup besar ada di tingkat 50% -70%. Jadi dari segi subyek atau peran partisipan di daerah X tingkat partisipasi masyarakat dalam proses Musrenbang cukup besar. Perlu peningkatan kuantitas LPMK sebagai koordinator tingkat kelurahan dalam keterlibatan Musrenbang, saat ini perwakilan terbesar di wilayahnya masih sangat

sedikit yaitu 1 orang per RW. Berdasarkan gender atau tingkat keterwakilan perempuan dalam partisipasi serta golongan difabel sudah sangat besar di daerah X. Tingkat prosentase terbesar adalah 70,00% menyatakan proses Musrenbang mudah dan efisien. Dan mekanisme Musrenbang sudah efektif mengakomodir aspirasi masyarakat dengan tingkat prosentase terbesar adalah 64,29%. Tingkat keaktifan partisipan atau subjek dari unsur unsur masyarakat pada proses Musrenbang terbesar berada ditingkat keaktifan antara 51% sampai 70%. Hal ini dinyatakan bahwa tingkat keaktifan masyarakat dalam proses Musrenbang cukup besar.

Meskipun secara empiris diperoleh data bahwa proses Musrenbang sudah berjalan cukup baik dari subyek maupun prosesnya, namun agar Musrenbang lebih baik lagi perlu adanya beberapa upaya sebagai berikut:

1. Keterlibatan masyarakat perlu lebih ditingkatkan lagi, baik dari segi kuantitas partisipan di setiap wilayah dan juga kualitas SDM dengan adanya standarisasi kompetensi yang terukur.
2. Pemerintah masih perlu melakukan edukasi kepada masyarakat umum hingga ditingkat lapisan masyarakat yang paling bawah, agar lebih faham tentang proses Musrenbang.
3. Bahan materi sosialisasi Musrenbang wajib disediakan secara soft file & hardcopy ke calon penerima sosialisasi untuk bisa disosialisasikan kepada lapisan masyarakat bawah dengan sistem yang sama oleh penerima sosialisasi yang lebih awal agar info tentang Musrenbang lebih banyak dipahami oleh lapisan masyarakat paling bawah.
4. Kejelasan info pelaksanaan program fisik/nonfisik yang bisa dilaksanakan di wilayah berdasarkan skala prioritas usulan yang masuk setiap tahunnya oleh setiap pelaksana anggaran.
5. Pemegang anggaran bisa menginfokan jenis kegiatan fisik/nonfisik yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan yang berlaku sehingga memudahkan wilayah dalam menentukan tujuan usulan dan skala prioritas usulan yang diutamakan menyesuaikan anggaran dan OPD yang mengampu.
6. Setiap LPMK memiliki data base usulan-usulan untuk menjadi bahan usulan

pramusrenbang dan juga sebagai monitoring usulan-usulan yang sudah atau belum terealisasi sehingga tidak terjadi pengulangan usulan di setiap tahunnya.

7. Dari awal Pramusrenbang perlu melibatkan Kampus, Ormas/Lembaga/Perkumpulan dan pelaku usaha di wilayah sebagai bentuk kerjasama wilayah dan bentuk channeling untuk bisa jadi pelengkap realisasi kegiatan fisik/nonfisik yang tidak bisa diampu oleh pelaksana anggaran dari OPD.
8. Peningkatan edukasi partisipasi pengawasan oleh tokoh masyarakat dan masyarakat atas pelaksanaan kegiatan fisik/nonfisik untuk mencegah adanya korupsi.
9. Adanya evaluasi dan laporan pertanggung jawaban yang transparan diseluruh pelaksana program Musrenbang, baik dari kelurahan, kecamatan, dinas-dinas terkait sampai pelaku proyek.

#### DAFTAR PUSTAKA

Aghion, P., & Jaravel, X. (1989).

*UPL8723279996324826528\_Knowledge\_Spillovers*. Agustina, N. (2017).

Mengukur Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik pada SMP

Uswatun Hasanah Jakarta *.Paradigma*, 19 (1) ,  
61–68.

<https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/paradigma/article/download/1540/1310>

Ah-Thiane, L., Ferrer, L., & Rousseau, C. (2023). PSMA Is Not Specific to Prostate Cancer. *Journal of Nuclear Medicine*, 64(8), 1326.

<https://doi.org/10.2967/jnumed.123.265720>

Akbar, S. (2019). Analisis Perencanaan Pembangunan Di Desa Sungai Beringin Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Indragiri*, 1–10.

Aminah, S., & Prasetyo, I. (2018). Partisipasi masyarakat dalam pengembangan

- organisasi wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM). *JPPM (Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 5(1), 61–73. <https://doi.org/10.21831/jppm.v5i1.17531>
- Andreeyan, R. (2014). Studi Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. *EJournal Administrasi Negara*, 2(4), 1940.
- BPK. (2008). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/4820>
- Dewi Wulaningrum, P. (2018). Pengembangan Kawasan Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Koripan 1 Dlingo. *BERDIKARI : Jurnal Inovasi Dan Penerapan Ipteks*, 6(2), 131–140. <https://doi.org/10.18196/bdr.6240>
- Dewi, Y., Ferichani, M., & Utami, B. (2015). Analisis Positioning Product Kecap Manis Lombok Gandaria dan Implikasinya terhadap strategi Bauran Pemasaran (Studi Kasus di Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar). *Agrista*, 3(3), 450–359.
- Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, K. K. (2014). DASAR- DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA Edisi II. In *DASAR- DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA Edisi II: Vol. Edisi II*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Dwiningrum, S. I. A. (2002). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Objek Wisata (STudi Kasus Objek Wisata Bukit Jamur Di Kecamatan Bungah Gresik)*. 51–58.
- Effendy, A. Y., & Kunto, Y. S. (2013). Pengaruh Customer Value Proposition Terhadap Minat Beli Konsumen Pada Produk Consumer Pack Premium Baru Bogasari. *Jurnal Manajemen Pemasaran PETRA*, 1(2), 1–8. <https://www.neliti.com/id/publications/131743/pengaruh-customer-value-proposition-terhadap-minat-beli-konsumen-pada-produk-con>
- Ekasari, Y. K. (2018). Pencapaian Siswa (Analisis Deskriptif Pada Sma Negeri Di Kabupaten Purwakarta. *Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 125–143. [Dedi Prayitno- \*\*Kontribusi Masyarakat Pada Perencanaan Daerah\*\*](http://stieb-</a></p></div><div data-bbox=)

---

perdanamandiri.ac.id/media/Jurnal/2018/10 JURNAL YULIANA  
EKA.pdf

- Firmansyah, D., & Dede. (2022). Teknik Pengambilan Sampel Umum dalam Metodologi Penelitian: Literature Review. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*, 1(2), 85–114. <https://doi.org/10.55927/jiph.v1i2.937>
- Haetami, M., & Triansyah, A. (2001). *Tingkat Partisipasi Masyarakat Di Kota Pontianak*. 1–9.
- Hariato; Rahardjo, M. dkk. (2022). *Dana Desa Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. 304. <http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/5666>
- Hariyoga, H. (2013). Strategi Mensinergikan Program Pengembangan Masyarakat Dengan Program Pembangunan Daerah. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 5(1), 47–60. [https://doi.org/10.29244/jurnal\\_mpd.v5i1.24193](https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v5i1.24193)
- Isti Pujihastuti. (2010). Prinsip Penulisan Kuesioner Penelitian. *Prinsip Penulisan Kuesioner Penelitian*, 2(1), 43–56.
- Iverson, B. L., & Dervan, P. B. (n.d.-a). *PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PENGAWASAN PEMBANGUNAN DI DESA TARIPA KECAMATAN PAMONA TIMUR KABUPATEN POSO*. 7823–7830.
- Iverson, B. L., & Dervan, P. B. (n.d.-b). *PERSEPSI MASYARAKAT LOKAL DAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI TENTANG TANGGUNG JAWAB ORANG TUA ATAS PENDIDIKAN ANAK*. *Jurnal UNTAN*, 7823–7830.
- Jufri, B. J. (2020). Tingkat Partisipasi Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bulucenrana Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang. *JIA: Jurnal Ilmiah Administrasi*, 8(3), 47–53. <https://doi.org/10.51817/jia.v8i3.276>
- Kartono, D. T., & Nurcholis, H. (2016). Konsep dan Teori Pembangunan. *Pembangunan Masyarakat Desa Dan Kota, IPEM4542/M*, 23–24.
- Ley 25.632. (2002). *KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 2002*.

- Maharani, A. A. S., Swastika, I. P. A., & Astawa, N. L. P. N. S. P. (2023). Analisis Kualitas Pelayanan Elektronik (E-SERVQUAL): Berfokus pada Website ZuBlu. *Kumpulan Artikel Mahasiswa Pendidikan Teknik Informatika (KARMAPATI)*, 12(1), 86–94. <https://www.zubludiving.com/>
- Muharam, S., Andri, A., & Harun, A. (2022). Kebijakan Strategi Pengembangan Wisata Di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Trias Politika*, 6(2), 164–184. <https://doi.org/10.33373/jtp.v6i2.4465>
- Nisa, M., & Anwar, S. (2020). Efektivitas Keluarga Utama Berakhlaqul Karimah Dalam Pemberdayaan Sumber Daya Manusia. *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 5(3), 351–372. <https://doi.org/10.15575/tamkin.v5i3.24188>
- Pranitasari, D., & Sidqi, A. N. (2021). Analisis Kepuasan Pelanggan Elektronik Shopee menggunakan Metode E-Service Quality dan Kartesius. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 18(02), 12–31. <https://doi.org/10.36406/jam.v18i02.438>
- Pratiwi, nuning. (2017). Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 1, 213–214.
- Quraisy, A., Wahyuddin, & Hasni, N. (2021). Analisis Kruskal-Wallis Terhadap Kemampuan Numerik Siswa. *VARIANSI: Journal of Statistics and Its Application on Teaching and Research*, 3(3), 156–161. <https://doi.org/10.35580/variansiunm29957>
- Rahman, A., & Rosmita. (2019). Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Desa Gemilang Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah Dan Komunikasi*, 1(2), 57–75.
- Rotty, S. J. L. (2016). Komparasi Kinerja Layanan Kesehatan pada Puskesmas Rawat Inap dengan Rawat Jalan di Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal EMBA*, 311(2), 311–322. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/13014>

- Saputra, A., Suliawati, & Hasibuan, A. (2020). Perbedaan Tingkat Kepuasan Konsumen Dengan Menggunakan Metode Statistik, Reliabilitas Dan Korelasi Di Indomaret Dan Alfamidi. *Buletin Utama Teknik*, 15(3), 241–248. <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/but/article/view/2839>
- Sayed, F., Ilato, R., Hafid, R., Moonti, U., & Sudirman, S. (2023). Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Konsumen Toko Amira Meubel Kota Gorontalo. *Journal of Economic and Business Education*, 1(2), 83–92. <https://doi.org/10.37479/jebe.v1i2.18651>
- Sombang, N. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi di Desa Wori Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara). *Jurnal Politico*, 10(3), 1–13.
- Susilowati, E. (2020). Bagaimana Pembelajaran Daring di Tengah Wabah Covid 19 melalui Grup WhatsApp ? *Jurnal Pendidikan Matematika Raflesia*, 05(03), 1–25.
- Tahulending, R., Kaunang, M., & Sumampow, I. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan (Musrembang) Di Desa Sonsilo Kecamatan Likupang Barat. *EKsekutif Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 1– 11.
- Undap, G. J. E. (2017). Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Bango Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2015. *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 1–11.
- Viera Valencia, L. F., & Garcia Giraldo, D. (2019). EVALUASI PROGRAM OPERASI PANGAN RIAU MAKMUR ( OPRM ) DI KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2010-2013. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2.
- Windi, W. A., Taufiq, M., & Muhammad, T. (2022). Implementasi Wilcoxon Signed Rank Test Untuk Mengukur Efektifitas Pemberian Video Tutorial Dan Ppt Untuk Mengukur Nilai Teori. *Produktif : Jurnal Ilmiah Pendidikan Teknologi Informasi*, 5(1), 405–410. <https://doi.org/10.35568/produktif.v5i1.1004>
- Yahdi Kusnadi, M. (2016). Paradigma Vol. Xviii. No.2 September 2016 Pengaruh

Keterimaan Aplikasi Pendaftaran Online Terhadap Jumlah Pendaftar Di Sekolah Dasar Negeri Jakarta. *Paradigma*, *Xviii*(2), 89–101.